

## **Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021**

**Iin Rohmadani, Arif Hartono, Titin Eka Ardiana**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Correspondens author: [iinrahma026@gmail.com](mailto:iinrahma026@gmail.com)

*Dikirim : Desember 2024*

*Diterima : Februari 2025*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of the Effectiveness of Application of Government Accounting Standards (SAP) and Regional Financial Management Information Systems (SIPKD) on the Quality of Financial Reports for the Madiun City Government in 2021. This research is classified as a quantitative study. The population in this study were all secretaries and treasurers of the finance sub-section at the Madiun City SKPD office. The technique of determining the sample with Total Sampling, where the number of samples is equal to the population. The number of samples in this study were 52 respondents where the entire population was used as the research sample. The method of data analysis in this study is multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 25. The partial results of the study show that the effectiveness of applying government accounting standards and regional financial management information systems has a significant positive effect on the quality of financial reports. Simultaneously the Effectiveness of Application of Government Accounting Standards and Regional Financial Management Information Systems has a significant positive effect on the Quality of Financial Reports.*

**Keywords:** *Government Accounting Standards (SAP), Regional Financial Management Information System (SIPKD), Quality of Financial Reports.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekretaris dan bendahara sub bagian keuangan pada kantor SKPD Kota Madiun. Teknik penentuan sampel dengan *Total Sampling*, dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat SPSS versi 25. Hasil Penelitian secara parsial menunjukkan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara serempak Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**Kata Kunci :** Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Laporan Keuangan.

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintah dituntut untuk melakukan transparansi dalam hal aktivitas pengelolaan sumber daya publik, penyusunan rencana dan pelaksanaan program. Laporan keuangan pemerintah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menuntut adanya penerapan standar laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan bagi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut yang digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan standar akuntansinya Penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah (Ahmadya, 2021).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bisa saja mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapannya oleh aparat pemerintah, hal tersebut dapat terjadi karena sumber daya manusia yang kurang, kapasitas memori dalam server kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan masalah teknis lainnya. Sehingga sistem akuntansi pemerintah perlu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi agar efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangan dapat tercapai (Ariandi, 2021). Suatu Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu aplikasi yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya dilakukan secara manual dirasa tidak efektif dan efisien dalam memberikan informasi yang akurat. Penyusunan laporan keuangan secara manual lebih berisiko terjadinya kesalahan. Sehingga dengan adanya perangkat pendukung sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah yang ditujukan untuk membantu pekerjaan pegawai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas laporan keuangan (Jauhari et al., 2021).

Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang memiliki hak otonomi diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi perhatian serius bagi aparat pemerintah Kota Madiun. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berupa pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Purnamasari, 2020).

Laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan standar akuntansi dan menilai kondisi keuangan, membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Perbaikan pengelolaan keuangan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik, dengan mengawasi kualitas laporan instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan dari pengertian yang menyedatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (tabloidsuksesinasional.com diakses pada 31 Mei 2022).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun awalnya menggunakan basis kas. Akibat adanya perubahan sistem informasi tersebut kemudian menjadi basis akrual. Permasalahan yang sering muncul dalam sistem informasi akuntansi yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu, kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang aset yang dimiliki. Selain itu juga, masih sering berubahnya regulasi mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya perbedaan ketentuan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan jangka waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban terlalu mendadak. Hal tersebut menyebabkan pengembangan atau penyesuaian sistem harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan saat input data (madiunkota.go.id diakses pada 07 April 2022). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Stewardship**

Teori stewardship merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait didalamnya. Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik (Jefri, 2018)

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **Efektivitas**

Seperti yang dikemukakan oleh Ariandi (2021) bahwa efektivitas suatu sistem ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Sistem yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 1 nomor 2 dijelaskan bahwa : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan. Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang atau kelompok sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Standar Akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang menyebutkan bahwa; Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

Menurut Jati (2019) definisi Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusunan, pengguna, dan auditor. Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Menurut Yanti et al (2020) penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah karena mempunyai kekuatan hukum.

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah awalnya berbasis kas atau CTA (*Cash Toward Accrual*) yaitu teknik pencatatan ketika transaksi dimana uang benar-benar diterima

atau dikeluarkan. Sedangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini sesuai PP 71 tentang SAP berbasis akrual yaitu tidak hanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas, tapi juga mencatat jumlah utang dan piutang (Brawijaya dan Yenni Latrini, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. SIPKD membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah, menyusun laporan keuangan lebih efisien, menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, dan menyajikan informasi yang akurat.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan. Sedangkan menurut Jati (2019) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Ternalemta, Kalangi, dan Tinangon, (2021) laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu suatu proses akuntansi yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi, laporan keuangan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

## **C. PELAKSAAAN DAN METODE**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekretaris dan bendahara sub bagian keuangan pada kantor SKPD di Kota Madiun yang berjumlah sebanyak 52 pegawai dari 26 kantor SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil sampel *Total Sampling* karena menurut Sugiyono (2019) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dilambangkan dengan huruf (X) Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini variabel bebas yaitu Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1) dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X2).

#### **2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)**

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel dependen disimbolkan dengan huruf (Y) Sugiyono (2019). Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y).

### **Metode**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu Sugiyono (2019). Pada penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti berupa data primer. Data primer didapatkan berdasarkan pengumpulan hasil jawaban yang telah

diberikan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji t (parsial), dan uji F (serempak).

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen dan mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e. \quad (1)$$

Y = Kualitas Laporan Keuangan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien Regresi

X1 = Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 = Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

E = Kesalahan regresi atau standart error (5%)

**Pengujian Hipotesis**

Metode analisis yang digunakan untuk menilai hipotesis dalam penelitian ini adalah uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Uji-t dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh parsial secara statistik antara variabel independen dan dependen. Uji-F dilakukan untuk melihat apakah hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik serempak signifikan. Koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa baik satu variabel dapat menjelaskan variabilitas variabel lain dengan melihat seberapa baik variabel itu menggambarkan variabel independen.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 25 didapatkan ringkasan hasil analisis regresi linier berganda antara variabel Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1) dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.025	3.921		1.536	.131
	X1	.320	.100	.408	3.181	.003
	X2	.384	.103	.478	3.724	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Dari hasil analisis regresi pada tabel 1 diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e. \quad (2)$$

$$Y = 6.025 + 0.320X_1 + 0.384X_2 = 5\% \quad (3)$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 6.025 artinya variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bernilai nol (0), maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 6.025 satuan atau 602.5% dengan asumsi bahwa variabel dependen dan independen lainnya bernilai konstan atau tetap.
2. Koefisien regresi variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0.320 artinya jika setiap peningkatan variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah di Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 0.320 satuan atau 32.0% dengan asumsi bahwa variabel dependen dan independen lainnya bernilai konstan atau tetap.
3. Koefisien regresi variabel efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.384 artinya jika peningkatan variabel efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah di Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 0.384 atau 38.4% dengan asumsi bahwa variabel dependen dan independen lainnya bernilai konstan atau tetap.

**Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan software SPSS versi 25 didapatkan hasil uji hipotesis sebagai berikut :

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel (Ghozali, 2018). Proses pengujiannya adalah dengan menentukan nilai  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini pada  $\alpha = 0.05$  dan nilai  $\alpha$  dibagi dua menjadi 0.025 karena menggunakan hipotesis dua arah. Total sampel (n) 52 dan k merupakan jumlah variabel dalam penelitian yaitu 3. Jadi diketahui nilai *Degree of Freedom* (df) = n – k = 52 – 3 = 49, sehingga ditemukan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.009. Hasil uji hipotesis uji t (parsial) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.025	3.921		1.536	.131
X1	.320	.100	.408	3.181	.003
X2	.384	.103	.478	3.724	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa (1) variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai sig 0.003 yang menunjukkan lebih kecil dari 0.05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu ( $3.181 > 2.009$ ). Sehingga dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Madiun. (2) variabel efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai sig 0.001 yang menunjukkan lebih kecil dari 0.05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu ( $3.724 > 2.009$ ). Sehingga dari hasil uji hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti yang berarti efektivitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kota Madiun

## 2. Uji F (Uji Serempak)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , dengan melakukan pengujian ini dapat diketahui apakah semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Proses pengujian ini menggunakan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  (0.05), sedangkan untuk menentukan nilai  $F_{tabel}$  menggunakan ketentuan  $df_1 = k-1$  ;  $3-1 = 2$  dan  $df_2 = n-k-1$  ;  $52-3 = 49$ , sehingga dapat ditentukan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.19. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	807.472	2	403.736	58.482	.000 <sup>b</sup>
Residual	338.278	49	6.904		
Total	1145.750	51			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), SIPKD, SAP

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji F ditunjukkan pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  adalah sebesar 58.482 dengan nilai sig sebesar 0.000. Sehingga nilai  $F_{hitung} >$  dari  $F_{tabel}$  yaitu ( $58.482 > 3.19$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, artinya variabel independen yaitu variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan ( $X_1$ ) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan ( $Y$ ).

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil nilai Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summaryb</b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.799 <sup>a</sup>	.638	.623	2.77688

a. Predictors: (Constant), SIPKD, SAP

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 ditunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.638 yang menunjukkan besarnya kemampuan variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X2) dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan (Y) di Kota Madiun sebesar 0.638 atau 63.8%. Sehingga sisanya 36.2% (100% - 63.8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah diolah dapat ditarik kesimpulan seperti berikut : (1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. (2) Hasil hipotesis kedua membuktikan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. (3) Hasil hipotesis ketiga membuktikan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin efektif penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Disarankan bagi Pemerintah Kota Madiun hendaknya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan cara menambah pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Sehingga jawaban responden dapat dibuktikan dengan kejadian riil dalam Instansi/Lembaga tempat responden bekerja.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu selama penyelesaian skripsi, terima kasih kepada kedua orang tua dan saudara yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dan semangat tiada henti kepada peneliti. Arif Hartono, SE., MSA selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran, petunjuk perbaikan serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Titin Eka Ardiana, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, serta kesabarannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadya, N. (2021). Analisis Rasio Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/79391>. Artikel Ilmiah Mahasiswa : Universitas Andalas
- Ariandi, F. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Palopo. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(1), 85–95.
- Brawijaya, I. G. A., & Yenni Latrini, M. (2020). Efektivitas SIPKD, Gaya Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja Pada Kinerja Karyawan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2). <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p18>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan*. In Seminar Nasional Hasil Penelitian-Stimik Handayani Denpasar (Issue September).
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1). <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145>
- Jauhari, H., Dewata, E. D., & Suhairi Hazisma. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2569>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3).
- Madiunkota.go.id (2021). "Good Governance" Diakses pada tanggal 07 April 2022 <http://madiun.kota.go.id/wp-content/uploads/2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perubahan Terakhir atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Petunjuk Pelaksanaan SIPKD 2010, Kementerian Dalam Negeri: Jakarta
- Purnamasari, fitri. (2020, November 25). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah/OPD di Kota Madiun). Skripsi : Widya Mandala surabaya catholic

- university in Madiun City Campus Repository. Retrieved April 7, 2022, from <http://repository.widyamandala.ac.id/>
- Redaksi. *Headline*, Madiun Raya. 10 Prioritas Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan APBD 2022. 2021/11/18 <https://tabloidsuksesinasional.com/10-prioritas-pembangunan-dan-pengelolaan-keuangan-apbd-2022/>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 2(1).
- Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>